



LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
Tanggal 16 Mei – 15 Agustus 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 16 Mei – 13 Juli 2023
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 14 Juli – 15 Agustus 2023)
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI
Tanggal 3 April 2023

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan Fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Menteri Perdagangan RI, Komisi VI menerima penjelasan dari Menteri Perdagangan RI dan akan melakukan Pembahasan terkait Rencana Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia Chile (*Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement*) untuk Penggabungan Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Jasa.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Anggaran :

1. Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 Mei 2023, dengan acara membahas program kerja Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 dan lain-lain.
2. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada tanggal 17 Mei 2023 dengan acara membahas program kerja Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 dan lain-lain.
3. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI, pembahasan mengenai RKP dan RKAKL TA 2024. Dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI mengenai arah kebijakan Rencana Kerja Kementerian Perdagangan RI TA 2024.
 - 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp1.954.848.108.000,-** (*Satu Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*), yang terbagi atas program:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.394.651.911,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*);
 - b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp266.986.682,- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);

- c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp293.209.515,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*)
 - 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar **Rp317.000.000.000,-** (*Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk membiayai beberapa program kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata sebesar Rp228.000.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah*);
 - b. Pembangunan Pusat Promosi Produk Dalam Negeri sebesar Rp35.000.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*);
 - c. Penguatan Peran Promosi Atase Perdagangan dan ITPC sebesar Rp45.000.000.000,- (*Empat Puluh Lima Miliar Rupiah*);
 - d. Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Produk Primer dan Produk Manufaktur sebesar Rp9.000.000.000,- (*Sembilan Miliar Rupiah*).
 - 4) Komisi VI DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan realokasi Anggaran tahun 2024 :
 - a. Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat, dengan memprioritaskan daerah yang tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2023;
 - b. Sosialisasi terkait Kebijakan Perdagangan; dan
 - c. Bantuan Sarana Perdagangan untuk UMKM.
 - 5) Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI menjadi bahan masukan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI dalam pembahasan RKP dan RKAKL Tahun 2024.
4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Pejabat Eselon I BP Batam dan BPKS Sabang, pembahasan mengenai RKP dan RKAKL TA 2024. Dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BPKS Sabang mengenai arah kebijakan Rencana Kerja BP Batam dan

BPKS Sabang Tahun Anggaran 2024.

- 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kepala BP Batam berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/ 04/2022 tanggal 10 April 2022, Pagu Indikatif BP Batam Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp2.662,64 miliar**, yang terbagi atas program:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp906,51 Miliar;
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.756,12 Miliar.
 - 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Wakil Kepala BPKS Sabang berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/ 04/2022 tanggal 10 April 2022, Pagu Indikatif Pagu Indikatif BPKS Sabang Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp62,306 miliar**, yang terbagi atas program:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp37,673 miliar;
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp24,633 miliar.
 - 4) Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BPKS Sabang menjadi bahan masukan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang dalam pembahasan RKP dan RKAKL Tahun 2024 tentang pagu indikatif.
5. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Pejabat Eselon I Kementerian BUMN RI, pembahasan mengenai RKP dan RKAKL TA 2024. Dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Kementerian BUMN RI mengenai arah kebijakan Rencana Kerja Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2024.
 - 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Kementerian BUMN RI berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04/2023 tanggal 10 April 2023, Pagu Indikatif

Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp255.661.469.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terbagi atas program:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp185.454.545.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp70.206.924.000,00 (*Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Sekretaris Kementerian BUMN RI mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar **Rp56.477.660.000,00** (*Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam Pagu Indikatif Tahun 2024.

4) Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Sekretaris Kementerian BUMN RI menjadi bahan masukan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dalam pembahasan RKP dan RKAKL Tahun 2024.

6. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM RI, pembahasan mengenai RKP dan RKAKL TA 2024. Dengan kesimpulan antara lain :

1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM RI mengenai arah kebijakan Rencana Kerja Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun Anggaran 2024.

2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM RI berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04/2023 tanggal 10 April 2023, Pagu Indikatif Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp1.226.376.670.000** (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tiga*

Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang terbagi atas program:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp416.144.568.000 (*Empat Ratus Enam Belas Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- b. Program Penanaman Modal sebesar Rp810.232.102.000 (*Delapan Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Rupiah*).

3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM RI mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar **Rp875.000.000.000** (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah*) yang dialokasikan dalam:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.64.000.000.000 (*Enam Puluh Empat Miliar Rupiah*);
- b. Program Penanaman Modal sebesar Rp.811.000.000.000 (*Delapan Ratus Sebelas Miliar Rupiah*).

4) Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM RI menjadi bahan masukan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/BKPM RI dalam pembahasan RKP dan RKAKL Tahun 2024.

7. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional/BSN dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, pembahasan mengenai RKP dan RKAKL TA 2024. Dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai arah kebijakan Rencana Kerja Badan Standardisasi Nasional dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2024.
- 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04/2023 tanggal 10 April 2023, Pagu Indikatif Badan

Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp228.483.822.000** (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang terbagi atas program:

- 3) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp134.923.956.000 (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- 4) Program Standardisasi Nasional sebesar Rp93.559.866.000 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- 5) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04/2023 tanggal 10 April 2023, Pagu Indikatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp115.485.314.000** (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) yang terbagi atas program:
 - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp23.695.637.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
 - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp91.789.677.000,- (*Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- 6) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar **Rp192.562.720.000,-** (*Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
 - a. Program Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp.78.331.043.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.114.231.677.000,- (*Seratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

7) Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjadi bahan masukan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pembahasan RKP dan RKAKL Tahun 2024.

8. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, pembahasan mengenai RKP dan RKAKL TA 2024. Dengan kesimpulan antara lain :

1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM mengenai arah kebijakan Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2024.

2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04/2023 tanggal 10 April 2023, Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar **Rp1.497.938.999.000,-** (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terbagi atas program:

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp411.038.534.000,- (*Empat Ratus Sebelas Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*);

b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.086.900.465.000,- (*Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar

Rp1.511.075.512.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

- 4) Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM menjadi bahan masukan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dalam pembahasan RKP dan RKAKL Tahun 2024.

9. Raker Komisi VI DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Menteri BUMN dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp255.661.469.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp185.454.545.000,- (*Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*)
 - b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp70.206.924.000,- (*Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian BUMN RI Tahun 2024 sebesar Rp56.477.660.000,- (*Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan prioritas yang belum terakomodir.
- 3) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN TA 2023 yang berasal dari Alokasi Pembiayaan Cadangan Investasi APBN 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp3.000 Miliar dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya
 - b. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp1.193 Miliar dalam rangka pembangunan infrastuktur KEK Mandalika dan Sanur
 - c. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1.000 Miliar dalam rangka *risk mitigation* perusahaan reasuransi dalam negeri

- d. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 500 Miliar dalam rangka investasi dan modal kerja
- 4) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN Tunai Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian BUMN, dengan perincian sebagai berikut:
- a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 10 Triliun yang akan digunakan untuk pencapaian target rasio elektrifikasi
 - b. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp 10 Triliun yang akan digunakan untuk pendanaan masa operasi dan sebesar Rp 12,5 Triliun akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor – Ciawi – Sukabumi dan Kayu Agung – Palembang – Betung
 - c. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp4 Triliun yang akan digunakan untuk pembelian 3 unit kapal penumpang untuk rute perintis
 - d. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3 Triliun yang akan digunakan untuk kapasitas pinjaman KUR dan sebesar Rp 3,56 Triliun yang akan digunakan untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya (dana berasal dari asset sitaan tipikor)
 - e. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 3 Triliun yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi
 - f. PT Rekayasa Industri sebesar Rp 2 Triliun yang akan digunakan untuk dukungan atas restrukturisasi struktur permodalan
 - g. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 1,9 Triliun yang akan digunakan untuk penyertaan kepada anak perusahaan dalam rangka investasi dan modal kerja
 - h. PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp 8 Triliun yang akan digunakan untuk penyehatan struktur permodalan
- 5) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN Non Tunai Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian BUMN, dengan perincian sebagai berikut:
- a. PT Len Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp 649 Miliar yang akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan

- b. PT Varuna Tirta Prakarsa (Persero) sebesar Rp 24,13 Miliar yang akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan
- 6) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
10. Raker Komisi VI DPR RI pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Menteri Perdagangan, dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan TA 2024 yang ditetapkan sebesar Rp1.954.848.108.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.394.651.911.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*)
 - b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp266.986.682.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*)
 - c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp293.209.515.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*)
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun 2024 sebesar Rp317.000.000.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Rupiah*) untuk membiayai beberapa program/kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Jajanan Kuliner dan Cinderamata sebesar Rp228.000.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Rupiah*);
 - b. Pembangunan Pusat Promosi Produk Dalam Negeri sebesar Rp35.000.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*);
 - c. Penguatan Peran Promosi Atase Perdagangan dan ITPC sebesar Rp45.000.000.000,- (*Empat Puluh Lima Miliar Rupiah*);

- d. Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Produk Primer dan Produk Manufaktur sebesar Rp9.000.000.000,- (*Sembilan Miliar Rupiah*).
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran TA 2024 sebesar Rp500.000.000.000,- (*Lima Ratus Miliar Rupiah*) antara lain untuk penguatan program sosialisasi dan penambahan alokasi Pasar Rakyat.
 - 4) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran Tahun 2023, sehingga sasaran program dapat tercapai secara maksimal.
 - 5) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait dengan penyelesaian pembayaran dana pembiayaan klaim Rafaksi Minyak Goreng oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
11. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Kepala BSN, Ketua KPPU dan Kepala BPKS Sabang, dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp.228.483.822.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 135.323.956.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

- b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp. 93.159.866.000,- (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp.115.485.314.000,- (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:
- a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp. 23.695.637.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.91.789.677.000,- (*Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- 3) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.192.562.720.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:
- a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp.78.331.043.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.114.231.677.000,- (*Seratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- 4) Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor

B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp.62.306.538.000 (*Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 37.673.291.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.24.633.247.000,- (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

5) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 99.082.550.000,- (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang akan digunakan untuk pelaksanaan program prioritas Tahun 2024.

6) Komisi VI DPR RI meminta Badan Standardisasi nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

12. Raker Komisi VI DPR RI pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Menteri Koperasi dan UKM, dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2022 sebesar 94,17% dan mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di Tahun 2023.
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM RI TA 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA

2024 yang ditetapkan sebesar Rp1.497.938.999.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

- 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp411.038.534.000,- (*Empat Ratus Sebelas Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*)
- 2) Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.086.900.465.000,- (*Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- 3) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2024 sebesar Rp1.511.075.512.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- 4) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk terus meningkatkan pengawasan dan penanganan koperasi-koperasi yang bermasalah, guna memperbaiki citra koperasi di tengah masyarakat dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri.
- 5) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menciptakan ekosistem usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian integral dari industri keuangan nasional, dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput.
- 6) Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai wali data untuk data tunggal Koperasi UMKM yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
- 7) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga secara intensif terkait dengan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.
- 8) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk turut serta secara aktif dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim.

- 9) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
13. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Kepala BP Batam, dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2024 yang ditetapkan sebesar Rp.2.662.635.900.000,- (*Dua Triliun Enam Ratus Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.906.514.280.000,- (*Sembilan Ratus Enam Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.1.756.121.620.000,- (*Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antar lembaga maupun instansi terkait secara intensif, untuk percepatan penyelesaian masalah yang masih ada.
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
14. Raker Komisi VI DPR RI pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM, dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian realisasi investasi Tahun 2022 oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar 100,6% dari target investasi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mendorong Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan kinerja realisasi investasi Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 2) Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.226.376.670.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 416.144.568.000,- (*Empat Ratus Enam Belas Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp. 810.232.102.000,- (*Delapan Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Rupiah*).
- 3) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.875.000.000.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah*) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.64.000.000.000,- (*Enam Puluh Empat Miliar Rupiah*).
 - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp.811.000.000.000,- (*Delapan Ratus Sebelas Miliar Rupiah*).
- 4) Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk terus menyempurnakan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko untuk mempermudah para pelaku usaha.

- 5) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
15. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada tanggal 15 Juni 2023, pengambilan keputusan terkait usulan PMN yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2023.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

A. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI

Rapat menyetujui pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 13 Juni 2023, dengan pembahasan terkait kinerja korporasi tahun 2022 dan permasalahan pilot CRJ dan ATR sebagai pilot di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terhadap capaian kinerja keuangan tahun 2022 yang semakin membaik.
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk memberikan kesempatan pertama kepada para Pilot CRJ 1000 & ATR 72-600 yang diberdayakan penugasan darat sementara dan mengambil cuti di luar tanggungan untuk kembali terbang seiring dengan penambahan pesawat di masa mendatang.
 - 3) Komisi VI DPR RI mendukung program optimalisasi sumber daya manusia PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- 4) Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (PERKOBK) pada tanggal 13 Juni 2023, menerima audiensi dari PERKOBK terkait piutang yang belum dibayarkan oleh BUMN PT Istaka Karya selama 10 tahun lebih. Dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI menerima audensi dari Persatuan Rakyat Korban BUMN PT. Istaka Karya (PERKOBK) terkait piutang yang belum dibayarkan oleh BUMN PT Istaka Karya selama 10 tahun lebih. Terkait hal tersebut, PERKOBK mengharapkan adanya solusi dari Komisi VI DPR RI untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
 - 2) Terkait dengan permasalahan PERKOBK, maka Komisi VI DPR RI akan menyampaikannya kepada mitra-mitra Komisi VI DPR RI dalam Rapat Komisi VI DPR RI guna mencari solusi dalam penyelesaian masalah PERKOBK tersebut.
 3. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero)/IFG, dan dirut PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/Injourney pada tanggal 14 Juni 2023, pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2003 yang bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023, dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) / *Indonesia Financial Group* terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) / *Indonesia Financial Group* sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) yang berasal dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023 dengan tujuan

penyelesaian pengalihan polis asuransi Jiwasraya dan menjaga *Risk Based Capital* (RBC).

- 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp.1.193.000.000.000,- (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah*) yang berasal dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023 dengan tujuan pelaksanaan penugasan pemerintah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyelesaian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebesar Rp.1.050.000.000.000,- (*Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah*).
 - b. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp. 143.000.000.000 (*Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Rupiah*).
 - 3) Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan PMN Tahun 2023 kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) / *Indonesia Financial Group* dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) yang berasal dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023 pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
 - 4) Komisi VI DPR RI meminta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) / *Indonesia Financial Group* dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lambat sebelum Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI pada tanggal 15 Juni 2023.
4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU pada tanggal 14 Juni 2023, pembahasan mengenai pendalaman usulan PMN 2023 yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2023, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI. Dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) yang berasal dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023 dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan perusahaan dalam rangka penguatan *Risk Based Capital* (RBC) dan pemulihan rating perusahaan.
- 2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD sebesar Rp.500.000.000.000,- (*Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang berasal dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023 yang akan digunakan untuk modal kerja dan investasi serta akan dialokasikan untuk tiga subklaster dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Subklaster peternakan melalui PT Berdikari sebesar Rp.235.000.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*)
 - b. Subklaster garam melalui PT Garam sebesar Rp.160.000.000.000,- (*Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah*)
 - c. Subklaster perdagangan dan logistik melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp.105.000.000.000,- (*Seratus Lima Miliar Rupiah*).
- 3) Seluruh penjelasan yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan PMN Tahun 2023 kepada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD yang berasal dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023 pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
- 4) Komisi VI DPR RI meminta PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lambat sebelum Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI pada tanggal 15 Juni 2023.

5. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN pada tanggal 15 Juni 2023, pembahasan mengenai Rencana IPO PHE, Rencana laba dan dividen TA 2024, Rencana aksi korporasi di PTPN (Palm Co dan Sugar Co), Pengambilan keputusan terkait usulan PMN yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2023. Dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp5,7 Triliun yang bersumber dari alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp3.000 Miliar dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya
 - b. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp1.193 Miliar dalam rangka pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur
 - c. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1.000 Miliar dalam rangka *risk mitigation* perusahaan reasuransi dalam negeri
 - d. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 500 Miliar dalam rangka investasi dan modal kerja.
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN RI memperhatikan catatan-catatan Fraksi-fraksi terkait dengan PMN yang bersumber dari alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN Tahun Anggaran 2023.
6. Rapat Dengar Pendapat Panja dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 21 Juni 2023, dengan acara pembahasan mengenai peraturan terkait pangan. Dengan kesimpulan antara lain :
 - 1) Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI terkait dengan kewenangan

Kementerian Perdagangan RI yang mengatur persoalan pangan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI memastikan tugas yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dilaksanakan sesuai tupoksi, kewenangan dan perangkat yang memadai, termasuk antara lain pengetahuan data *stock* pangan dan barang kebutuhan pokok, pemantauan kebijakan harga, distribusi sekaligus pengawasannya.
 - 3) Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI memastikan bahwa Kementerian Perdagangan RI mempunyai kewenangan yang cukup untuk bergerak cepat dalam hal adanya distorsi atau gangguan pasar, logistik maupun distribusi produk pangan dan barang kebutuhan pokok.
 - 4) Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pengembangan sistem monitoring harga pangan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
 - 5) Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI.
5. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 11 Juli 2023, pembahasan mengenai peran strategis Pos Indonesia dalam penanganan logistic Pemilu Tahun 2024. Dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI mendukung PT Pos Indonesia (Persero) sebagai *Official Partner/Verified Vendor* Logistik Pemilu tahun 2024 untuk pengiriman domestik dan internasional.

- 2) Komisi VI DPR RI mengapresiasi program Integrasi *End-to-End Logistics* dan *Dashboard Real Time* PT Pos Indonesia (Persero) yang terintegrasi dengan SILOG KPU untuk mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024.
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk memastikan keamanan logistik Pemilu tahun 2024 dan mengedepankan asas netralitas, jujur dan adil.
 - 4) Komisi VI DPR RI meminta PT Pos Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
6. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Bina Medika IHC pada tanggal 12 Juli 2023, pembahasan mengenai Kinerja Keuangan Korporasi Tahun 2022, Rencana Holdingisasi Rumah Sakit BUMN, Progress Pembangunan Rumah Sakit IHC di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, Bali (Lahan Injourney); dan Lain-lain. Dengan kesimpulan antara lain :
- 1) Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina Bina Medika/ IHC untuk terus meningkatkan kinerja dengan cara melakukan perbaikan manajemen, data, pelayanan dan fasilitas medis agar kualitas rumah sakit milik IHC mampu bersaing di pasar internasional.
 - 2) Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Bina Medika/ IHC untuk melakukan audit keuangan konsolidasi untuk melihat seluruh aset yang dimiliki sebelum proses holdingisasi rumah sakit milik BUMN selesai dilakukan.
 - 3) Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Bina Medika/ IHC untuk terus melakukan penguatan holdingisasi rumah sakit milik BUMN dengan memperhatikan transformasi organisasi, transformasi digital dan transformasi SDM.
 - 4) Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Bina Medika/ IHC untuk memastikan agar progres pembangunan Bali International Hospital Sanur berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan, menuju pembangunan kawasan wisata medis di Bali.

- 5) Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Bina Medika/ IHC untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
7. Rapat Dengar Pendapat Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT PLN (Persero) pada tanggal 12 Juli 2023, pembahasan mengenai roadmap Transisi Energi Berbasis Fosil ke Listrik. Dengan catatan rapat antara lain :
- 1) Panja Transisi Energi Listrik Komisi VI DPR RI mendukung PT PLN (Persero) dalam menciptakan ekosistem transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
 - 2) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk melaksanakan akselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia dengan menyediakan pasokan listrik yang handal, infrastruktur pengisian daya kendaraan yang memadai, aplikasi terintegrasi *end to end* serta berbagai insentif dalam penggunaan kendaraan listrik.
 - 3) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi penggunaan kendaraan listrik dan alat rumah tangga lainnya kepada masyarakat beserta manfaatnya berupa penghematan finansial dalam rangka mendukung transisi energi.
 - 4) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung program transisi energi.
 - 5) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk membuat percontohan transisi energi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul.
 - 6) Panja Transisi Energi ke Listrik Komisi VI DPR RI meminta PT PLN (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

B. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23-25 Mei 2023.
2. Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23-25 Mei 2023.
3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja dan kontribusi BUMN ke PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal pada tanggal 26-28 Juni 2023.
4. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja dan kontribusi BUMN ke PT Bio Farma (Persero) Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal pada tanggal 26-28 Juni 2023.
5. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja dan kontribusi BUMN ke PT Pegadaian Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal pada tanggal 26-28 Juni 2023.
6. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja dan kontribusi BUMN ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal pada tanggal 5-7 Juli 2023.
7. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja dan kontribusi BUMN ke PT Wijaya Karya(Persero)Tbk Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal pada tanggal 5-7 Juli 2023.
8. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja dan kontribusi BUMN ke PT PGN Tbk Serang, Provinsi Banten pada tanggal pada tanggal 5-7 Juli 2023.

9. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan Kawasan industri pupuk kujang, peninjauan Kawasan tangkuban perahu dan kinerja korporasi BUMN di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14-18 Juli 2023.
10. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka kinerja korporasi dan progress pengembangan Kawasan strategis BP Batam di Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14-18 Juli 2023.
11. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka kemitraan BUMN (HIMBARA) dengan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Kinerja korporasi BUMN di wilayah Jawa Timur dan kontribusi semen Indonesia terhadap provinsi Jawa Timur meliputi kinerja keuangan, penyerapan tenaga kerja local maupun asing serta program CSR kemitraan dengan masyarakat sekitar di Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14-18 Juli 2023.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022 – 2023.

Jakarta, 25 Juli 2023

KABAGSET KOMISI VI DPR RI,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP. 19710407 199203 2 001